



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1447);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

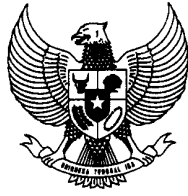
KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dijadikan acuan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 130 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

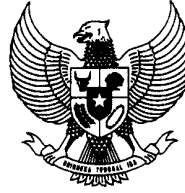
- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

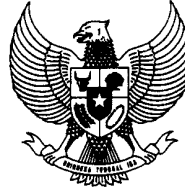
No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
Informasi tentang Profil Kemen PPPA						
1.	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap dan kontak serta tugas dan	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

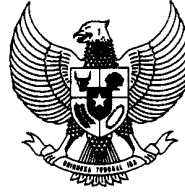
	fungsi					
2.	Struktur Organisasi	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
3.	Profil Singkat Pimpinan Tertinggi	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
4.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
5.	Informasi Program/Kegiatan Tahun 2025	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
6.	Program Strategis/Prioritas Tahun 2025	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
7.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kemen PPPA	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

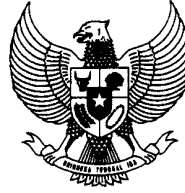
8.	Informasi khusus pelayanan publik lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
9.	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat negara	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
10.	Ringkasan Informasi mengenai Kinerja	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
11.	Laporan Tahunan	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
Informasi Keuangan						
12.	Laporan Keuangan yang Telah diaudit Tahun 2024	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

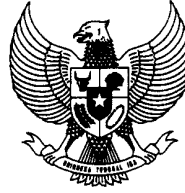
13.	Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
14.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
15.	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
Informasi Laporan Akses Informasi Publik						
16.	Ringkasan Akses Informasi Publik	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Kemen PPPA						
17.	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

18.	Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik						
18.	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
19.	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran						
20.	Tata cara pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional /	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (SP4N – LAPOR!) dan <i>Whistle Blowing System</i>					
--	---	--	--	--	--	--

B. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1.	<i>Hotline</i> SAPA 129	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan dan Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



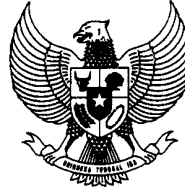
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

			Perlindungan Khusus			
--	--	--	---------------------	--	--	--

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

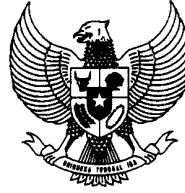
No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1.	Buku “Menemukenali dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas (Panduan Dasar untuk Orang Tua, Keluarga dan Pendamping)”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
2.	Buku “Mengenal Gangguan Psikososial Pada Anak”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3.	Buku “Panduan Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
4.	Buku “Panduan Pencegahan dan Penanganan Anak Perilaku Sosial Menyimpang”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
5.	Buku “Penanganan Gangguan Psikososial pada Peserta Didik”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
6.	Protokol Lintas Sektor Untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dalam Situasi Pandemi Covid-19	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

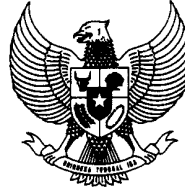
7.	Protokol Pengasuhan Bagi Anak Tanpa Gejala, Anak Dalam Pemantauan, Pasien Anak Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Anak Dengan Orang Tua/Pengasuh/Wali Berstatus Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Orang Tua yang Meninggal Karena Covid-19	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
8.	Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid-19	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

9.	Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
10.	Protokol Perlindungan Khusus Bagi Pengungsi Anak dan Pengungsi Anak dari Luar Negeri	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
11.	Pedoman Pengukuran Pemenuhan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
12.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	On proses	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

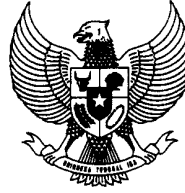
	tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak					
13.	Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 83 Tahun 2025 tentang Borang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	On proses	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
14.	Pedoman Teknis Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
15.	Pedoman Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

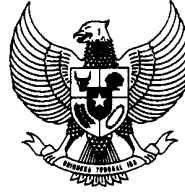
16.	Pedoman Hari Anak Nasional ke-41 Tahun 2025	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
17.	SK Sesmen No 71 Tahun 2025 tentang Panitia Penyelenggara HAN Ke-41 Tahun 2025	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
18.	SE Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peringatan HAN Ke-41 Tahun 2025	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
19.	Laporan Keuangan dan CALK Deputi PKA TA 2024	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
20.	RUP Deputi PKA TA 2025	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

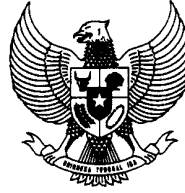
			yang Memerlukan Perlindungan Khusus			
21.	Laporan Kinerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak TA 2024	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
22.	Flyer SAPA 129	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
23.	Infografis Data Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tahun 2024	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak & Sekretariat Kementerian	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak & Sekretariat Kementerian	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
24.	Nota Dinas dan SPTJM Progsun	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak &	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak &	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

	Deputi Bidang PKA Tahun 2025	Sekretariat Kementerian	Sekretariat Kementerian			
25.	MoU Kemen PPPA dengan Bank BCA tentang Peningkatan Layanan SAPA 129	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
26.	PKS Kemen PPPA dengan JARAK tentang Kerja Sama Proyek Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Pekerja Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
27.	SK Deputi PKA Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Bantuan Pemerintah Dalam	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretariat Kementerian	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

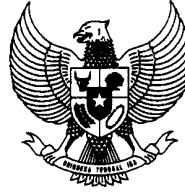
	Perlindungan Khusus Anak					
28.	Standar Operasional Prosedur Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak Berbasis Masyarakat	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
29.	Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perempuan dan Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
30.	Modul Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui SAPA129 Terintegrasi	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

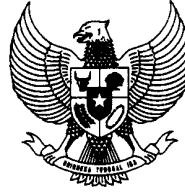
31.	SK Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Nomor 69 Tahun 2022 tentang SOP Layanan Sahabat Anak	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputy Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
32.	SK Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Nomor 645 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan bagi SDM Penyedia Layanan/Lembaga	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
33.	SK Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kebijakan	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

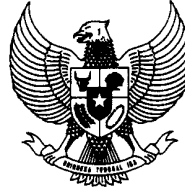
	Keselamatan Anak Bagi Penyedia Layanan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
34.	Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak Tahun 2024	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
35.	Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 85 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

	Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2024		Pemenuhan Hak Anak			
36.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
37.	Pedoman Pengasuhan Keluarga	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

38.	Pedoman Pelibatan Anak di Kementerian/Lembaga	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
39.	Pedoman Partisipasi Lembaga masyarakat, Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
40.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

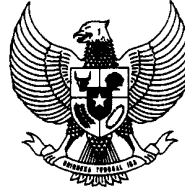
41.	Data jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, kondisi khusus dan situasi darurat termasuk P2GP melalui SIMFONI PPA/SPHPN	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Kondisi Khusus Situasi Darurat	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
42.	Perjalanan Lima Tahun Subklaster Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender, Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019 - 2024	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Kondisi Khusus Situasi Darurat	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
43.	Laporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Perlindungan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

	dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2024		Dalam Rumah Tangga Kondisi Khusus Situasi Darurat			
44.	Rekomendasi untuk Pengembangan Rencana Strategis Implementasi Sektor Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI 2024-2030) terkait Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan terhadap Perubahan Iklim	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Kondisi Khusus Situasi Darurat	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

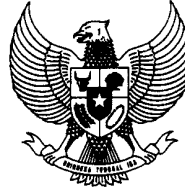
45.	Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2014-2023	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Kondisi Khusus Situasi Darurat	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
46.	Modul Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Komprehensif	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Kondisi Khusus Situasi Darurat	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
47.	Informasi tentang Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

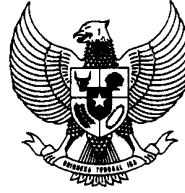
			Perdagangan Orang			
48.	Petunjuk Teknis (Juknis) Penyediaan dan Standar Layanan Rumah Perlindungan Pekerja dan Pegawai Perempuan (RP3) di Tempat Kerja	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
49.	Data Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Tempat Kerja	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
50.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

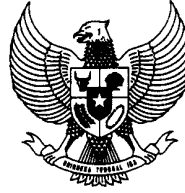
			Perlindungan Hak Perempuan			
51.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
52.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

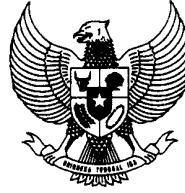
53.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelayanan Teknis Daerah PPA	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
54.	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Perlindungan dan Pemulihan TPKS	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
55.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

	Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan		Layanan Terpadu dan Asisten Deputi Layanan Perempuan Korban Kekerasan			
56.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	2011, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
57.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Perempuan Pekerja	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2014, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

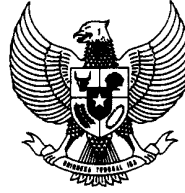
58.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
59.	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 Rencana Aksi Nasional PP TPPO Tahun 2020 – 2024	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
60.	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 (Perubahan atas Nomor 69 Tahun 2008) tentang Gugus Tugas Pencegahan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

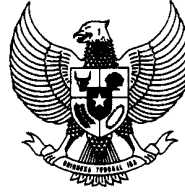
	dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang		Perdagangan Orang			
61.	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 (Perubahan kedua atas nomor 69 Tahun 2008) tentang Gugus Tugas PP TPPO	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
62.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2021 tentang SOP Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau korban TPPO	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
63.	Peraturan Ketua Harian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sub	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat		Tindak Pidana Perdagangan Orang			
64.	Informasi tentang jumlah kasus perempuan korban kekerasan yang masuk melalui Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	Setiap bulan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
65.	Informasi alur pengaduan kasus perempuan korban kekerasan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	Setiap bulan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
66.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

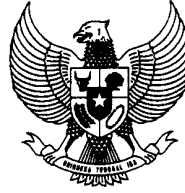
	Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak		Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak			
67.	Pedoman Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang ditetapkan dengan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 27A Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak di Daerah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

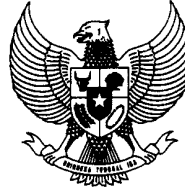
68.	Pedoman Kode Etik Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
69.	Video KIE Pusat Informasi Sahabat Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
70.	Media/Majalah Forum Anak (MALFORA)	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Setiap 4 bulan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

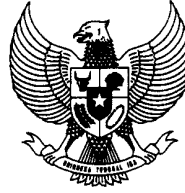
			Pemenuhan Hak Anak Wilayah I			
71.	Suara Anak Indonesia Tahun 2025	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
72.	DAFA Award Tahun 2025	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	2025, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
73.	Data Forum Anak Tahun 2024	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

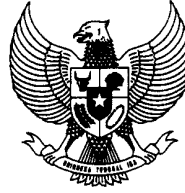
74.	Pusat Informasi Sahabat Anak yang terstandar tahun 2024 dan SDM yang Tersertifikasi Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
75.	Video KIE Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
76.	Jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak Menurut Wilayah dan Jenjang	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
77.	Jumlah dan Daftar Puskesmas Ramah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

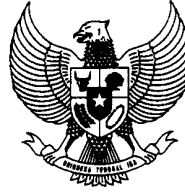
	Anak Menurut Wilayah		Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III			
78.	Jumlah dan Daftar Pusat Kreativitas Anak Menurut Wilayah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
79.	Jumlah dan Daftar Rumah Ibadah Ramah Anak Menurut Wilayah dan Tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
80.	Jumlah dan Daftar Satuan Pendidikan Ramah Anak yang Terstandar Menurut Wilayah dan Tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

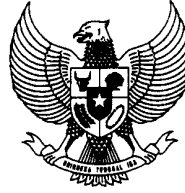
81.	Jumlah dan Daftar Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas yang Terstandar Menurut Wilayah dan Tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
82.	Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
83.	Pedoman Pusat Kreativitas Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
84.	Pedoman Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

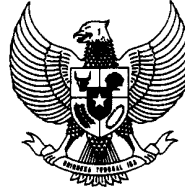
			Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III			
85.	Pedoman Rumah Ibadah Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
86.	Panduan Pengisian Borang Instrumen Standardisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
87.	Panduan Pengisian Borang Instrumen Standardisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

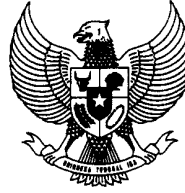
88.	Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Ketersediaan Ruang Ramah Anak dan Perempuan di Lingkungan Muhammadiyah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
89.	Modul Ruang ASI Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
90.	Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pengembangan Masjid Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

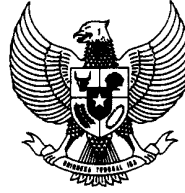
91.	Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah Melalui Gereja Katholik Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
92.	Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Gereja Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
93.	Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Klenteng Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
94.	Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

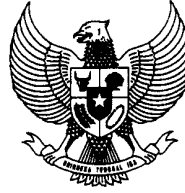
	Ibadah melalui Pura Ramah Anak		Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III			
95.	Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Vihara Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
96.	Surat Edaran Menteri PPPA tentang Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah Melalui Gereja Katolik Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
97.	Surat Edaran Menteri PPPA tentang Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah Melalui Gereja Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

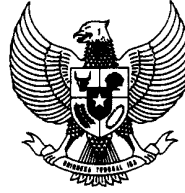
98.	Surat Edaran Menteri PPPA tentang Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah Melalui Pura Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
99.	Surat Edaran Menteri PPPA tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak di Daerah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
100.	Profil Pengarusutamaan Gender Pusat dan Daerah Tahun 2024	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
101.	Laporan Kinerja Asisten Deputi Perumusan Kebijakan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

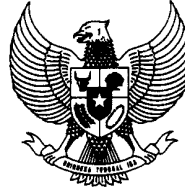
	Kesetaraan Gender Tahun 2024		Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender			
102.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
103.	Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim Indonesia 2024 - 2030	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

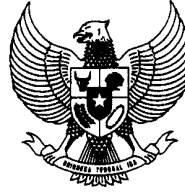
104.	Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
105.	Pedoman Edukasi Gizi bagi Ibu dan Anak	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
106.	Panduan Gizi Seimbang bagi Lansia	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
107.	Panduan Gizi Seimbang Bagi Ibu Hamil	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

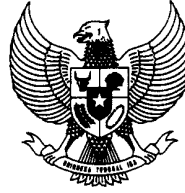
			Daerah Wilayah III			
108.	Modul Bimtek PPRG untuk Pencegahan Stunting	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
109.	Roadmap Pelaksanaan Pengembangan Sekolah Perempuan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
110.	Modul Sekolah Perempuan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
111.	Buku Pedoman Peningkatan Peran	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

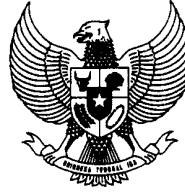
	Laki-laki dalam Penurunan AKI		Pemerintah Daerah Wilayah III			
112.	Buku Hukum Perkawinan Islam Indonesia	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
113.	Buku Hukum Pidana Islam Indonesia	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
114.	Buku Ajar Hadist	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
115.	Buku Pendidikan Pancasila Dan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

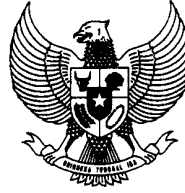
	Kewarganegaraan Berprespektif Gender		Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III			
116.	Buku studi Al-Quran	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
117.	Buku Fiqh dan Ushul Fiqh	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
118.	Buku Fiqh An-Nisa	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

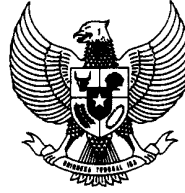
119.	Buku Ilmu Dakwah	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
120.	Buku Relasi Gender dalam Agama-Agama	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
121.	Buku Gender dan Pembangunan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
122.	Buku Bahasa Indonesia	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang	2020, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

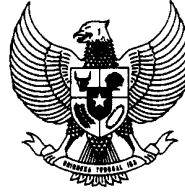
			Pembangunan Manusia dan			
123.	Buku Pedoman Pelaksanaan Pengintegrasian Gender ke dalam Kurikulum di PTKI	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2020, Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Sesuai retensi arsip
124.	Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Standar Lulusan yang RG di PTKI	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Sesuai retensi arsip
125.	Booklet Policy Brief Pengintegrasian Gender kedalam Kurikulum PTKI	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2020, Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Sesuai retensi arsip
126.	Buku Policy Paper/ Naskah Kebijakan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan	2020, Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Sesuai retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

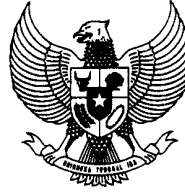
	tentang Indikator Kebijakan Nasional yang Responsif Gender		Gender Bidang Pembangunan Manusia dan			
127.	Buku Pedoman Pembelajaran dan Penilaian yang Responsif Gender	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	2019, Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Sesuai retensi arsip
128.	Bahan Ajar kasus Berbasis Kesetaraan Gender pada Pendidikan dan Pelatihan Aparatus Sipil Negara	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2015, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun
129.	Parameter Kesetaraan Gender dalam Bentuk	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang	2011, Jakarta	<i>Softcopy</i>	14 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

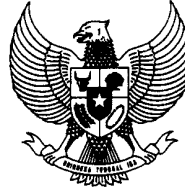
	Peraturan Perundang-undangan		Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
130.	Partisipasi Perempuan dalam Pengawasan Pembangunan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2015, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun
131.	Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kemenlu	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2015, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

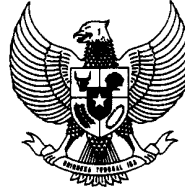
132.	Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Polri	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2015, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun
133.	Profil Gender Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan di Provinsi Bangka Belitung	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2015, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun
134.	Profil Gender Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan di Provinsi Kalimantan Barat	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi	2015, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

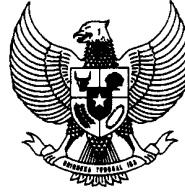
			Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
135.	Profil Gender Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan di Provinsi Sulawesi Tenggara	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2015, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun
136.	Capaian dan Inovasi Pelaksanaan PUG di Lingkungan Kemendagri	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun
137.	Modul Pelatihan Kepemimpinan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

	Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah (Jilid 1,2,3)		Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
138.	Modul Kebangsaan Perspektif Gender	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun
139.	Profil Pelaksanaan PUG di LAN	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

			Pemerintah Daerah Wilayah II			
140.	Profil Pelaksanaan PUG di Mahkamah Agung	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	10 Tahun
141.	Profil PUG di Provinsi Banten	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun
142.	Profil Pelaksanaan PUG di Provinsi Maluku Utara	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

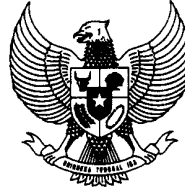
			Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
143.	Profil Pelaksanaan PUG di Provinsi Sulawesi Barat	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun
144.	Profil Pelaksanaan PUG di Provinsi Sulawesi Tenggara	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

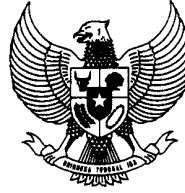
145.	Profil Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Selatan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun
146.	Sistem Pemilu dan Peran Partai Politik Dalam Memenuhi Quota 30% Perempuan di Legislatif di Indonesia	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i>	9 Tahun
147.	Modul Kepemimpinan Perempuan di Perdesaan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi	2017, Jakarta	<i>Softcopy</i>	8 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

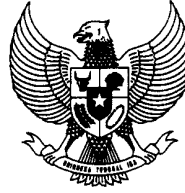
- 59 -

			Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
148.	Modul Pembekalan Calon Anggota Legislatif	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2017, Jakarta	<i>Softcopy</i>	8 Tahun
149.	Modul Pengarusutamaan Gender Bidang Politik	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2017, Jakarta	<i>Softcopy</i>	8 Tahun
150.	Isu-isu Ketimpangan Gender dalam	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan	2017, Jakarta	<i>Softcopy</i>	8 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 60 -

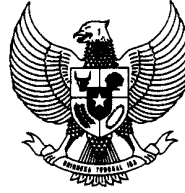
	Pembangunan Nasional		Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
151.	Modul Penguatan Kapasitas Anggota Legislatif Perempuan Periode 2019-2024	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2018, Jakarta	<i>Softcopy</i>	8 Tahun
152.	Modul Penguatan Partisipasi Perempuan Bela Negara	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan	2018, Jakarta	<i>Softcopy</i>	7 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

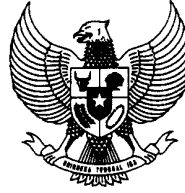
			Pemerintah Daerah Wilayah II			
153.	Buku Bahan KIE Bidang Politik dan Hukum	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
154.	Infografis Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun
155.	Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

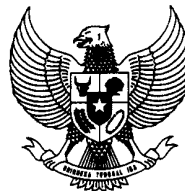
			Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
156.	Lembar Balik Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	4 Tahun
157.	Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	4 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

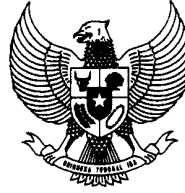
158.	Modul Pelatihan Pengintegrasian Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Daring)	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	4 Tahun
159.	Modul Pelatihan Pengintegrasian Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Luring)	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	4 Tahun
160.	Buku Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

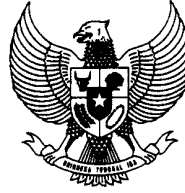
			Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
161.	Daftar Periksa Gender dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun
162.	Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD 2020-2029	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun
163.	Grand Design Peningkatan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

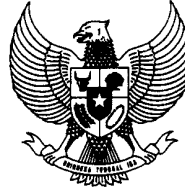
	Keterwakilan Perempuan dlm Politik dan Pengambilan Keputusan Menuju Planet 50:50 Gender Equality 2030		Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
164.	Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten - Kota	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
165.	Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan - Kelurahan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

			Pemerintah Daerah Wilayah II			
166.	Policy Brief Rancangan Undang-Undang Partai Politik Menata Ulang Kebijakan Afirmasi di Partai Politik	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
167.	Policy Brief Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) Menata Ulang Kebijakan Afirmasi di Partai Politik	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
168.	Policy Brief Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 67 -

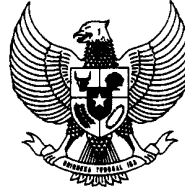
	Pemilu) Menata Ulang Kebijakan Kuota untuk Meningkatkan Keterwakilan Politik Perempuan		Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
169.	Parlemen Hasil Pemilu Profil Gender Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
170.	Permen PPPA No 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	2 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

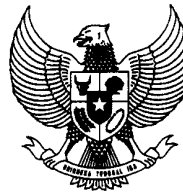
171.	Permen PPPA No 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
172.	Permen PPPA No 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2018, Jakarta	<i>Softcopy</i>	7 Tahun
173.	Bela Negara Tahun 2018	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum,	2019, Hambalang	<i>Softcopy</i>	7 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

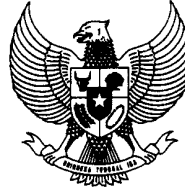
			dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
174.	Forum Penguatan Komitmen Pemimpin Perempuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pembangunan Perempuan dan Anak Menuju Planet 50-50 Gender Equality 2030	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2018, Jakarta	<i>Softcopy</i>	7 Tahun
175.	Peningkatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2018, Jakarta	<i>Softcopy</i>	7 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

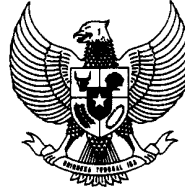
176.	Peningkatan Kapasitas Perempuan Anggota DPR dan DPD Terpilih pada Pemilihan Umum 2019	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
177.	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
178.	Video Edukasi Kesetaraan Gender	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

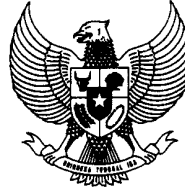
			Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II			
179.	Sejarah dan Peran serta Partisipasi Perempuan Indonesia	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	6 Tahun
180.	Modul Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	4, 3, 2, 1 Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

181.	Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
182.	Data agregat Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
183.	Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
184.	Publikasi Profil Anak Indonesia	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
185.	Publikasi Profil Perempuan Indonesia	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
186.	Publikasi Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

	Perlindungan Khusus Anak (IPKA)					
187.	Peta sebaran data gender dan anak	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
188.	Laporan Simfoni PPA	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
189.	Publikasi Sinergi Data Kekerasan terhadap perempuan 3 Kementerian/lembaga	Biro Data dan Informasi	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI